

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Fungsi Politik Partai Golkar menjelang Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Kupang. Variable utama dalam analisis penelitian ini adalah Penerapan Fungsi Politik Partai Golkar menjelang Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Kupang, aspek-aspek yang diukur sebagai berikut:

- a) Komunikasi Politik
- b) Sosialisasi Politik
- c) Rekrutmen Politik

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

5.1 Penerapan Fungsi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar Kota Kupang menjelang pemilu legislative 2019

Sebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana Komunikasi Politik. adapun Penerapan Fungsi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar Kota Kupang menjelang pemilu legislative 2019, antara lain :

- a) Bentuk kegiatan yang dilakukan partai golkar seperti dalam melakukan sosialisasi politik melalui seminar-seminar politik mengenai pemahaman politik
- b) Cara yang dilakukan partai golkar dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat seperti kampanye massa atau aktif dalam kegiatan bermasyarakat

5.1.1 sosialisasi politik melalui seminar-seminar politik mengenai pemahaman politik

Adapun sosialisasi politik melalui seminar-seminar politik mengenai pemahaman politik menjelang Pemilu Legislatif 2019 sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Yonas Salean selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang sekaligus Caleg yang Terpilih dalam Pemilihan Legislatif Provinsi :

Tidak ada sama sekali seminar-seminar politik mengenai pemahaman politik menjelang Pemilu Legislatif 2019 yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Kupang yang ada hanya dilakukan oleh DPD 1 Partai Golkar Nusa Tenggara Timur berupa kegiatan Workshop dan Pembekalan kepada seluruh kader Partai Golkar yang akan mengikuti dalam bursa calon anggota legislatif dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten Se-NTT. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mutiara pada tanggal 24 Agustus 2018 sedangkan Sosialisasi yang dilakukan Partai Golkar sendiri adalah lewat kader kadernya yaitu

bagaimana menjadi kader Golkar yang baik bagaimana kader Golkar bersikap, disitu masyarakat dapat menilai Partai Golkar mampu mendidik dan memberikan bekal kepada kader-kadernya untuk bagaimana ketika dia mencalonkan diri bisa benar benar bersikap dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tentunya membawa roh Partai Golkar itu sendiri.²

Jawaban senada juga disampaikan Bapak Alfred Djami Wila selaku Caleg Partai Golkar Kota Kupang yang terpilih dari wilayah Dapil lima (5) yaitu Kecamatan Alak :

Tidak ada seminar politik yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Kupang menjelang pemilu legislative 2019 dimana seminar politik hanya dilakukan oleh DPD 1 Partai Golkar Nusa Tenggara Timur dengan menghadirkan caleg-caleg yang akan maju dalam pemilihan legislative 2019 sedangkan yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Kupang hanya sebatas pada sosialisasi serta konsolidasi partai melalui caleg yang akan maju dalam pileg 2019 dengan turun ke dapil dan basis-basis wilayah masing-masing.³

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Yoseph Dogon selaku Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD II Partai Golkar Kota Kupang sekaligus Caleg Terpilih dari Dapil 3 (Kecamatan Maulafa) :

Sosialisasi politik menjelang pemilihan legislatif ada dan sudah diagendakan setiap kelurahan minimal 1 kali dan bisa 2-3 kali per kelurahan yang diprakasai oleh pimlur atau pimpinan kelurahan dan melibatkan pimcat atau pimpinan kecamatan serta dihadiri oleh Tiap Pimpinan DPD II Partai Golkar Kota Kupang. Setelah itu naik ke tingkat kecamatan, di kecamatan juga diadakan 3 kali dikali dengan 6 kecamatan dan diakhiri Terakhir tingkat kota mengenai strategi-strategi politik untuk memenangkan Partai Golkar.⁴

² Wawancara dengan Bapak Yonas Salean selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang sekaligus Caleg yang Terpilih dalam Pemilihan Legislatif Provinsi

³ Wawancara dengan Bapak Alfred Djami Wila selaku Caleg Partai Golkar Kota Kupang yang terpilih dari wilayah Dapil lima (5) yaitu Kecamatan Alak

⁴ Wawancara dengan Bapak Yoseph Dogon selaku Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD II Partai Golkar Kota Kupang

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mira Pellu selaku Caleg Golkar Kota Kupang dari Dapil III Kecamatan Oebobo :

Kalau di Partai Golkar tidak ada seminar Politik yang ada hanya sosialisasi politik, banyak sekali yang kami lakukan dengan tujuan menambah wawasan anak-anak muda dan masyarakat pemahaman tentang politik. Misalnya waktu itu kan kami mengadakan sosialisasi tentang anak muda bersama anak ORMAS yaitu AMPI dan juga AMPG partai golkar kami juga menggelarkan betapa pentingnya belajar politik, pada waktu itu tujuan utamanya anak muda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 3 (tiga) informan penelitian mengenai sosialisasi politik melalui seminar-seminar politik mengenai pemahaman politik menjelang pemilu legislative 2019 di Kota Kupang maka peneliti menyimpulkan bahwa Tidak ada sama sekali seminar-seminar politik mengenai pemahaman politik menjelang Pemilu Legislatif 2019 yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Kupang yang ada hanya dilakukan oleh DPD 1 Partai Golkar Nusa Tenggara Timur berupa kegiatan Workshop dan Pembekalan kepada seluruh kader Partai Golkar yang akan mengikuti dalam bursa calon anggota legislatif dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten Se-NTT sedangkan yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Kupang hanya sebatas pada sosialisasi politik serta konsolidasi partai melalui caleg yang akan maju dalam pileg 2019 dengan turun langsung ke dapil dan basis-basis wilayah masing-masing caleg serta agenda sosialisasi politik yang dimulai dari pinplur atau pimpinan dan melibatkan pimcat atau pimpinan kecamatan serta dihadiri oleh Tiap Pimpinan DPD II Partai Golkar Kota Kupang.

Setelah itu naik ke tingkat kecamatan, dandiakhiri Terakhir tingkat kota mengenai strategi-strategi politik untuk memenangkan Partai Golkar.

5.1.2 Pendekatan terhadap masyarakat seperti kampanye massa atau aktif dalam kegiatan bermasyarakat

Adapun pendekatan terhadap masyarakat seperti kampanye massa atau aktif dalam kegiatan bermasyarakat sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Zetyo Ratu Arat selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu sekaligus Caleg Terpilih dari Dapil 1 (Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama):

Sebenarnya memang regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 cukup panjang sehingga kampanye yang kami gunakan kepada masyarakat lewat kampanye yang bersifat umum dan ideologis serta kampanye lewat media elektronik dan media social misalnya seperti Group facebook DPD II Golkar Kota Kupang terutama berkaitan caleg yang ada di Dapil 1-5.⁵

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Petrus Ndolu selaku Bagian PP Wilayah Kelapa Lima sekaligus caleg dari Dapil II Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama :

“Kampanye yang dilakukan oleh partai Golkar menjelang pemilihan legislative lebih banyak berupa melalui kampanye dialogis dan tatap muka yang dilakukan RT dan RW yang tersebar di 51 Kelurahan dan 6 Kecamatan yang ada di Kota Kupang”.⁶

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Osias Lado selaku Caleg dari Dapil V Kecamatan Alak :

Jujur saja hanya kampanye ideologis yang kami gunakan atau ke *door to door* karena Menurut kami itu sangat efisien sekali atau sangat baik sekali atau sangat mudah mendapat respon maupun Simpati kepada rakyat,

⁵ Wawancara dengan Bapak Zetyo Ratu Arat selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu sekaligus Caleg Terpilih dari Dapil 1 (Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama)

⁶ wawancara dengan Bapak Petrus Ndolu selaku Bagian PP Wilayah Kelapa Lima sekaligus caleg dari Dapil II Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama

karena *door to door* rakyat tau sudah benar Siapa calegnya dia, Apa itu Partai Golkar, visi misi Partai Golkar maupun kedepannya Partai Golkar seperti apa dan yang paling penting bagaimana Partai Golkar ke depan menjembatani keinginan masyarakat dan pemerintah.⁷

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Saturminus Jawa selaku Caleg dari Dapil V Kecamatan Alak :

“jenis-jenis kampanye yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar menjelang pemilihan legislative lebih banyak berupa Pemasangan alat peraga di tempat umum seperti Baliho serta pembagian sticker caleg yang akan maju dalam pemilihan legislative kota kupang tahun 2010”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai Pendekatan terhadap masyarakat seperti kampanye massa atau aktif dalam kegiatan bermasyarakat mengenai pemahaman politik menjelang pemilu legislative 2019 di Kota Kupang maka peneliti menyimpulkan kampanye dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Kupang dilakukan lewat kampanye umum, ideologis serta kampanye lewat media elektronik dan media social seperti Group facebook, *door to door* , dan Pemasangan alat peraga di tempat umum seperti Baliho serta pembagian sticker caleg. Hal ini diperkuat pada gambar tentang Kampanye Partai Golkar lewat Media Sosial (Group Facebook Golkar) dan sosialisasi Pemilih Milenial dibawah ini.

⁷ wawancara dengan Bapak Osias Lado selaku Caleg dari Dapil V Kecamatan Alak

⁸ wawancara dengan Bapak Saturminus Jawa selaku Caleg dari Dapil V Kecamatan Alak

Gambar Kampanye Golkar lewat Media Sosial (Group Facebook Golkar)



5.2 Penerapan Fungsi Sosialisasi Politik DPD Partai Golkar Kota Kupang menjelang pemilu legislative 2019

Adapun Penerapan Fungsi Sosialisasi Politik DPD Partai Golkar Kota Kupang menjelang pemilu legislative 2019, dilakukan melalui

- a) pendidikan politik ataupun indoktrinasi politik,
- b) sebagai perantara dalam proses sosialisasi politik seperti melalui keluarga ataupun media massa

5.2.1 Pendidikan politik ataupun indoktrinasi politik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Partai politik wajib melaksanakan pendidikan politik sebagai tercantum dalam pasal 31, yaitu :

- (1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁹

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.¹⁰

Adapun Pendidikan politik ataupun indoktrinasi politik yang dilakukan oleh DPD II Golkar Kota Kupang menjelang Pemilihan Legislatif 2019

⁹ pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

¹⁰ Pasal 34 ayat 3a dan 3b

sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Marsel Nono selaku Wakil Sekretaris Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM :

“DPD II Partai GOLKAR Kota Kupang dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara terjun langsung masyarakat mensosialisasikan program-programnya serta visi misi partai”.¹¹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Mira Pellu :

Untuk memberikan pendidikan politik DPD partai GOLKAR Kota Kupang terhadap anggota partai atau para kader GOLKAR yaitu dengan mengadakan diklat dimana di berikan pengetahuan tentang bagaimana tugas sebagai calon legeslatif dan pembelajar mengenai politik yang di namakan diklat karakter.¹²

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Alfred Djamiwila :

Pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan politik DPD II GOLKAR Kota Kupang lewat para kader dan anggota dengan turun langsung kemasyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Saturminus Jawa :

Metode yang pertama *one united complain*, yang kedua dan sekarang edukasi politik bagi masyarakat yang ada. Karena baru-baru ini kalau kita flashback memang agak susah karena waktu itu kan ada 5 pemilihan sekaligus. Kami memberikaan edukasi politik tahapan yang dasar itu, Kemudian kami memperkenalkan kader-kader kami dalam kota Kupang dapil ini calegnya ini dan ini. Karena jujur saja waktu itu banyak sekali para caleg-caleg dan sampai kewalahan, salah satu edukasi yang kami berikan yaitu meberikan pengetahuan tentang itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai Pendidikan Politik dan Indoktrinasi Politik dilakukan dengan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Marsel Nono selaku Wakil Sekretaris Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM

¹² wawancara dengan Ibu Mira Pellu selaku Caleg Golkar Kota Kupang dari Dapil III Kecamatan Oebobo

¹³ wawancara dengan Bapak Alfred Djamiwila

mengadakan diklat dimana di berikan pengetahuan tentang bagaimana tugas sebagai calon legeslatif dan pembelajar mengenai politik yang di namakan diklat karakter sehingga ketika anggota atau kader partai dengan terjun langsung ke masyarakat memperkenalkan program-programnya serta visi misi partai serta dapat untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5.2.2 sebagai perantara dalam proses sosialisasi politik seperti melalui keluarga ataupun media massa

Adapun sebagai perantara dalam proses sosialisasi politik seperti melalui keluarga ataupun media massa sebagaimana hasil Wawancara dengan Bapak Yoseph Dogon :

Kalau media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi politik banyak tetapi kalau media yang saya gunakan selama hanya melalui keluarga dengan pendekatan dari hati ke hati lewat keluarga atau istilah saya itu tim kerja keluarga kalau kita pileg, pada prinsipnya itu lewat keluarga, sahabat dan handaai taulan karena dari sisi penyampaian dan hubungan emosionalnya lebih erat dan kuat.¹⁴

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Osias Lado :

media massa yang biasanya partai golkar gunakan sebagai medium sosialisasi politik menjelang pemilihan legislatif 2019 adalah melalui media online seperti Facebook DPD II Golkar Kota Kupang yang mempresentasikan dan menggambarkan secara jelas tentang profil caleg golkar beserta visi, misi dan program partai Golkar.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Yoseph Dogon

¹⁵ wawancara dengan Bapak Oasis Lado

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Alfred jhamawila:

Sosialisasi Politik yang saya lakukan menjelang pemilihan legislatif 2019 adalah melalui pertemuan dengan keluarga dan simpatisan saya yang ada di Dapil (5) yaitu Kecamatan Alak selain itu media massa yang saya gunakan adalah majalah/koran yang ada di Kota Kupang seperti Pos Kupang, Timor Express dan Victory News.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Petrus Ndolu:

Ini semua dipergunakan baik dari kekeluargaan, media massa juga selalu ada, Media elektronik juga yaitu selalu berupa iklan-iklan, semua sarana itu selalu digunakan Partai Golkar agar supaya dengan berbagai sarana-sarana itu begitu banyak masyarakat di berbagai pelosok mengetahui bahwa Partai Golkar yang betul-betul nasionalis yang berikan sumbangsih, support, dukungan, perjuangan untuk masyarakat bangsa ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai sosialisasi politik sebagai sarana seperti melalui keluarga ataupun media massa yang digunakan oleh DPD II Golkar Kota Kupang adalah melalui pertemuan melalui keluarga dengan pendekatan dari hati ke hati serta melalui media massa dan online seperti Facebook dan majalah/koran yang ada di Kota Kupang seperti Pos Kupang, Timor Express dan Victory News.

5.3 Penerapan Fungsi Rekrutmen Politik DPD Partai Golkar Kota Kupang menjelang pemilu legislative 2019

Penjelasan tentang fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 29 ayat 1 dan 1a, 2 dan 3.

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a) anggota Partai Politik;
- b) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.”¹⁶

Adapun Penerapan Rekrutmen Politik DPD Partai Golkar Kota Kupang menjelang pemilu legislative 2019, antara lain :

- a) Rekrutmen politik partai Golkar Berdasarkan AD/ART
- b) Rekrutmen politik berdasarkan kesepakatan dan kebijakan internal partai

¹⁶ pasal 29 ayat 1 dan 1a, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

- c) Tata cara yang digunakan partai Golkar dalam merekrut dengan melalui penentuan, pembobotan dan penilaian kader partai

5.3.1 Rekrutmen politik partai Golkar Berdasarkan AD/ART

Adapun Rekrutmen politik partai Golkar sesuai AD/ART Partai Golkar tentang kaderisasi dan keanggotaan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yonas Salean :

Pertama itu wajib anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu harus dipakai dan menjadi pedoman pada saat rekrutmen politik kader partai dan caleg dan lain sebagainya. Berdasarkan AD/ART Golkar, dalam merekrut seorang anggota yang akan dicalonkan dalam pemilihan umum legislatif atau sejenisnya, perlu melalui beberapa tahapan yang ada. Persyaratan tersebut tercantum di dalam AD/ART BAB IV - Kader, Pasal 5. Yaitu Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria : Mental - Ideologi; Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai; Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT); Kepemimpinan; Militansi dan mandiri.¹⁷

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zetyo Ronny Ratuarat selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemenangan Pemilu :

Rekrutmen politik partai Golkar menjelang pemilu legislatif 2019 sudah Berdasarkan AD/ART dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik misalnya dalam perekrutan caleg perempuan yang merupakan kader partai dari Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) serta keterwakilan 30% caleg perempuan dalam pemilihan legislatif 2019 di Kota Kupang.¹⁸

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Markus Ndolu selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi :

¹⁷ hasil wawancara dengan Bapak Yonas Salean

¹⁸ wawancara dengan Bapak Zetyo Ronny Ratuarat selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemenangan Pemilu

“Sistem keanggotaan dan perkaderan partai Golkar sejak era reformasi, tidak mengalami terlalu banyak perubahan, kecuali pada Sistem Perkaderan, ditambahkan Pelatihan Kader Profesi Masyarakat (PKPM), yang bertujuan untuk melatih para simpatisan dan anggota yang berada pada sektor Usaha Kecil Masyarakat (UKM), sehingga dapat memberi dukungan ketrampilan, akses permodalan, manajemen, pemasaran dan lain-lain. Partai Golkar secara tidak langsung, ingin memberikan perhatian sebagai perwujudan doktrin partai, yaitu Karya dan Kekaryaan, tentang bagaimana ikut mengatasi persoalan kesempatan kerja. Penugasan kader, sebagai bagian dari program pengelolaan kader partai, yang meliputi, 1) Rekrutmen Anggota, 2) Diklat Perkaderan, 3) Penugasan kader/Rekrutmen dalam jabatan politik, 4) Penilaian Kader, merupakan program penting yang sangat menentukan sejauh mana penampilan partai dapat terlihat oleh publik. Oleh karena itu, dalam hal penugasan kader-kader partai Golkar untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, partai Golkar menetapkan mekanisme yang demokratis dan terbuka, sehingga dapat menghindari sejauh mungkin praktik-praktik KKN.”¹⁹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yoseph Dogon:

Rekrutmen politik partai Golkar sesuai AD/ART, kan dia musti ada ikut pemenaan fungsional Partai Golkar, dia musti ikut Penataran, pembinaan teknis fungsional, dia ikut *Bimbingan Teknik* istilahnya, baru boleh jadi caleg sesuai anggaran dasar, Kita semua harus di BINTEK (Bimbingan Teknis) yaitu teknik fungsional Partai Golkar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai Rekrutmen politik berdasarkan AD/ART Partai Golkar pedoman partai Golkar dalam merekrut kader partai dan caleg dan lain sebagai sudah berdasarkan AD/ART Golkar, melalui beberapa tahapan yang ada. Persyaratan tersebut tercantum di dalam AD/ART BAB IV - Kader, Pasal 5. Yaitu Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria : Mental - Ideologi; Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform

¹⁹ wawancara dengan Bapak Markus Ndolu selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi

Partai; Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT); Kepemimpinan; Militansi dan mandiri; sebagaimana diamanatkan AD/ART dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta sebagai perwujudan doktrin partai, yaitu Karya dan Kekaryaannya, tentang bagaimana ikut mengatasi persoalan kesempatan kerja. Penugasan kader, sebagai bagian dari program pengelolaan kader partai, yang meliputi, 1) Rekrutmen Anggota, 2) Diklat Perkaderan, 3) Penugasan kader/Rekrutmen dalam jabatan politik, 4) Penilaian Kader, merupakan program penting yang sangat menentukan sejauh mana penampilan partai dapat terlihat oleh publik.

5.3.2 Rekrutmen politik berdasarkan kesepakatan dan kebijakan internal partai

Adapun Rekrutmen politik berdasarkan kesepakatan dan kebijakan internal partai sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Marcel Nono :

“Rekrutmen Politik yang dilakukan oleh partai berdasarkan kebijakan internal adalah kader partai Golkar sendiri yang diutamakan berdasarkan kualifikasi dan kualitas kader seperti pengabdian, komitmen dan loyalitas”.²⁰

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yonas Salean ;

Rekrutmen yang dilakukan berdasarkan kebijakan internal partai menjelang pemilu legislatif 2019 adalah kader-kader yang berkualitas melalui organisasi-organisasi sayapnya sebagai perpanjangan tangan Partai Golkar supaya Partai Golkar dapat masuk ke dalam berbagai lapisan masyarakat. Seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Himpunan Wanita

²⁰ wawancara dengan Bapak marcel nono

Karya (HWK), Al Hidayah, Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Satkar Ulama, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Generasi Muda KOSGORO 1957, Barisan Muda KOSGORO (BMK), Generasi Muda MKGR, Baladika Karya, dan sebagainya.²¹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Petrus Ndolu:

Kebijakan internal yang kami lakukan mengikuti hasil Munas (Musyawarah Nasional), yang dituangkan dalam juklak yang berisi tentang penjelasan mengenai mekanisme perekrutan Caleg yaitu SK No. 227 Tahun 2013 Tentang Pencalegan yang mengatur bagaimana mekanisme perekrutan Caleg. Didalamnya tertuang tentang mekanisme penjangkaran, penentuan nomer urut, siapa-siapa yang berhak menjadi tim seleksi, dan sebagainya. Mekanisme penjangkaran dan penomoran nomer urut tersebut dinilai dari PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela) melalui team 7 sebagaimana diatur AD/RT Partai Golkar Pada Pasal 22 tentang Kedudukan, Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang ada di Kabupaten/Kota.²²

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Saturminus Jawa:

Semua keputusan itu berdasarkan seluruh kesepakatan karena berkarya dan bergotong-royong artinya musyawarah itu yang paling diutamakan setiap hasil keputusan-keputusan, contohnya Golkar mau menempatkan kadernya untuk menjadi Caleg di kota Kupang yaitu lewat musyawarah yang tidak keluar dari AD/ART partai tadi, jadi ada semua kader yang memenuhi syarat, semua kader yang dipandang layak itu harus dimusyawarahkan secara baik agar supaya tidak terjadi kepincangan-kepincangan atau rasa ketersinggungan antara sesama kader dalam partai, itu dimusyawarahkan secara baik dan secara terbuka bahwa kader-kader ini diterjunkan karena dia memiliki potensi yang cukup dari berbagai aspek dia memenuhi persyaratan, itu dimusyawarahkan secara bersama lewat rapat-rapat baik itu secara khusus maupun rapat-rapat secara umum dari semua kepengurusan partai, kalau di tingkat kota sampai tingkat Kelurahan itu selalu diundang sehingga dalam suatu hasil yang memutuskan suatu kesepakatan itu berdasarkan musyawarah di internal partai.

²¹ wawancara dengan Bapak yonas salean

²² wawancara dengan Bapak Petrus Ndolu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai Rekrutmen politik berdasarkan kesepakatan dan kebijakan internal partai adalah kader partai Golkar sendiri yang diutamakan berdasarkan kualifikasi dan kualitas kader seperti pengabdian, komitmen dan loyalitas, serta melalui organisasi-organisasi sayapnya sebagai perpanjangan tangan Partai Golkar supaya Partai Golkar dapat masuk ke dalam berbagai lapisan masyarakat. Seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Himpunan Wanita Karya (HWK), Al Hidayah, Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Satkar Ulama, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Generasi Muda KOSGORO 1957, Barisan Muda KOSGORO (BMK), Generasi Muda MKGR, Baladika Karya, dan sebagainya serta Kebijakan internal yang mengikuti hasil Munas (Musyawarah Nasional), yang dituangkan dalam juklak yang berisi tentang penjelasan mengenai mekanisme perekrutan Caleg yaitu SK No. 227 Tahun 2013 Tentang Pencalegan yang mengatur bagaimana mekanisme perekrutan Caleg. Didalamnya tertuang tentang mekanisme penjaringan, penentuan nomer urut, siapa-siapa yang berhak menjadi tim seleksi, dan sebagainya. Mekanisme penjaringan dan penomoran nomer urut tersebut dinilai dari PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak tercela) melalui team 7 sebagaimana diatur AD/RT Partai Golkar Pada Pasal 22 tentang Kedudukan, Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang ada di Kabupaten/Kota.

5.3.3 Tata cara yang digunakan partai Golkar dalam merekrut dengan melalui penentuan, pembobotan dan penilaian kader partai

Adapun Tata cara yang digunakan partai Golkar dalam merekrut dengan melalui penentuan, pembobotan dan penilaian kader partai sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yonas Salean :

Partai Golkar memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader/ Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah: Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif; Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar; Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.²³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yoseph Dogon :

Biasanya aspek atau tata cara yang digunakan dalam melakukan perekrutan Caleg DPD II Partai Golkar Kota Kupang melalui Aspek Pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam partai Golkar yang meliputi partisipasi seorang kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus Ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.²⁴

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zetyo Ratuarat :

Kita disurvei yaitu dengan dalam penentuan pembobotan dan penilaian kader partai, semua disurvei jadi jelas dan hasil survei bukan internal kita Partai Golkar, minta tim survei yang dipakai oleh pak presiden dan itu kita urunan duit untuk membiayai survei supaya kita tahu pasti,itu mekanismenya. Salah satu aspeknya adalah Penugasan Fungsionaris (laporan kegiatan penugasan) yaitu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap Fungsionaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti orientasi fungsionaris. Penugasan fungsionaris dimaksudkan

²³ wawancara dengan Bapak Yonas Salean

²⁴ wawancara dengan Bapak Yoseph Dogon

agar tiap-tiap fungsionaris partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan program karya-kekaryaan di daerah penugasan masing-masing.”²⁵

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Alfred jhamawila:

Tata cara yang digunakan partai Golkar dalam merekrut dengan melalui penentuan, pembobotan dan penilaian kader partai salah satunya aspek Pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan kepartaian ditambah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat dari sisi basis dukungan massa.²⁶

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Osias Lado:

kita disurvei yaitu dengan dalam penentuan pembobotan dan penilaian kader partai, semua disurvei jadi jelas dan hasil survei bukan internal kita Partai Golkar, minta tim survei yang dipakai oleh pak presiden dan itu kita urunan duit untuk membiayai survei supaya kita tahu pasti, waktu itu survey nasional yang melakukan survey seluruh propinsi dan kota di NTT dan hasilnya adalah ketika nama-nama yang diusulkan kami punya tahap pra dan calon sebelum KPU memutuskan . Setelah pra itu dilaksanakan disurvei dulu masuk dan itu menjadi kesepakatan lagi bersama para pengurus inti dari kota misalnya DPD 1 waktu itu berembuklah dan akhirnya setelah itu di DPD 2 diserahkan di DPD 1 dan diserahkan ke pusat di Jakarta setelah DPD 1 bawa ke Jakarta kemudian take pulang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai Tata cara yang digunakan partai Golkar dalam merekrut dengan melalui penentuan, pembobotan dan penilaian kader partai pemahaman politik menjelang pemilu legislatif 2019 di Kota Kupang maka peneliti menyimpulkan bahwa Kriteria-kriteria yang digunakan DPD II Golkar Kabupaten melalui 3 aspek yaitu aspek pengabdian, penugasan fungsionaris dan pendidikan dan sudah

²⁵ wawancara dengan Bapak Zetyo Ratuarat

²⁶ wawancara dengan Bapak Alfred jhamawila

menjalankan kriteria sendiri tentang kader/ Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar.

Adapun Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Kabupaen/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tata Cara Pembobotan untuk Calon anggota DPRD Kabupaen/Kota

	ASPEK YANG DIBERI BOBOT	%
1.	Pengabdian	40
2.	Penugasan Fungsionaris	20
3.	Pendidikan	10